

**REVITALISASI *CIVIC DISPOSITION* MELALUI MATA PELAJARAN PPKN DI
SMA NEGERI 16 MEDAN T.P 2019/2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan*

OLEH :

MUHAMMAD ASLAM
NPM : 1502060018



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 28 September 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama Lengkap : Muhammad Aslam
NPM : 1502060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Revitalisasi Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan T.P 2019-2020

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

PANITIA PELAKSANA

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd


Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lahmuddin, S.H, M.Hum
2. Jamaludin, S.Pd, M.Pd
3. Hotma Siregar, S.H, M.H

1. 

2. 

3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Aslam
NPM : 1502060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Revitalisasi *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan T.P 2019/2020

Sudah layak disidangkan

Medan, 23 September 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing



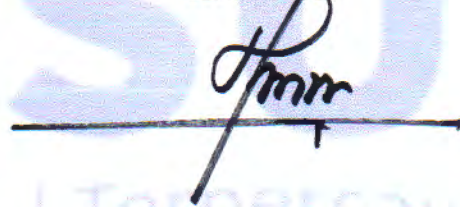
Hotma Siregar, S.H., M.H

Diketahui Oleh :



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Ketua Prodi



Lahmuddin, S.H, M.Hum



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Muchtar Bashri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama : Muhammad Aslam
NPM : 1502060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Revitalisasi Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan T.P 2019/2020

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17 September 2019	Systematika Penulisan		
	Bab iv		
20 September 2019	Perbaikan hasil Penelitian		
21 September 2019	Ace.		

Medan, 21 September 2019

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuudin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Hotma Siregar, S.H., M.H

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Aslam
NPM : 1502060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Revitalisasi *Civic Disposition* melalui mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 16 Medan T.P 2019/2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019

Hormat saya

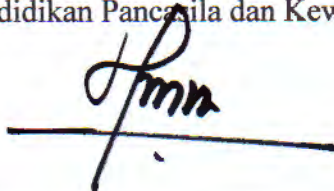
Yang memberi pernyataan,



**METERAI
TEMPEL**
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Aslam

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Lahmuddin, S.H., M.Hum

ABSTRAK

MUHAMMAD ASLAM,1502060018. REVITALISASI *CIVIC DISPOSITION* MELALUI MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 16 MEDAN T.P 2019/2020.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah melemahnya karakter kewarganegaraan pada diri peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana revitalisasi karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 16 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan subjek adalah peneliti sendiri dan objeknya adalah siswa kelas XI SMA Negeri 16 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang diperoleh bahwa kompetensi dasar dan materi PPKn terintegrasi dengan *civic disposition* diantaranya materi hak asasi manusia dan demokrasi pancasila serta dalam proses maupun perencanaan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan Tahun Pelajaran 2019-2020 menunjukkan penguatan karakter kewarganegaraan yang meliputi karakter publik dan karakter privat . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa revitalisasi karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020. Disarankan kepada kepala sekolah hendaknya agar memperhatikan dan memaksimalkan program-program yang dapat mendukung revitalisasi *civic disposition* siswa.

Kata kunci : Revitalisasi, Civic Dispositon, Mata Pelajaran PPKn

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang sangat kita harapkan syafaat di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan mana kala penulis merasa telah samapai di final studi di jenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan mengenai isi maupun dalam pemakaian, tetapi penulis berusaha agar skripsi ini baik dan benar, keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, Keluarga, teman-teman dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan pengesahan dan pengalaman terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“Revitalisasi Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan T.P 2019/2020”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa ayahanda tercinta Supratman serta ibunda tercinta Siti Sahara (Almh) yang telah mengasuh, membimbing dan membina serta banyak memberikan pengorbanan berupa

materi dan dorongan serta kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. **Bapak Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
3. **Ibu Dra. Hj. Syamsyuurnita, M.Pd** sebagai pembantu dekan 1 Fkip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Bapak Lahmuddin, SH, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Hotma Siregar, SH, MH** selaku Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Medan Ibu Faiziah S.Pd M.Si Guru bidang studi Pkn dan staf pegawai saya ucapkan Terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di tempat tersebut.
8. Kepada Abah Al, Abah Awal, Abah Arif, Kakak Nuri, Abah Amir, Adik Akhyar, Kakak Nimah, Kakak Ika, Kakak Nining, Abang Fadly, Kakak Yuni yang telah membantu, mendukung, memberi semangat, dan mendoakan segala kegiatan penulis, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
9. Kepada teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya kelas PPKn A-Sore 2015 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Agung, Tiwi, Finka, dan Yuni, Upi, Imawati, Leni Marlina serta anak kelas PPKn A-Pagi dan PPKn A- malam 2015
10. Kepada para sahabat kak Dinda, Kinanty, Nining, REPSAS, Pancakarsa, Yayasan AMANDA, klg 93, MasIga, keluarga Magang dan KKN SMA As-Syafiiyah, Second Fam 68 yang sangat membantu serta memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Dan kepada semua pihak yang ikut mendukung dalam memberikan semangat dalam menyelesaikan masalah ini

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis harapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua amin ya rabbal'alam

Medan, September 2019

Penulis

Muhammad Aslam

NPM:1502060018

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Kerangka teoritis	6
1. Pengertian Revitalisasi.....	6
2. Pengertian <i>Civic Disposition</i>	6
a. Karakter Privat dan Publik.....	8
b. Karakter Cerdas	12
3. Mata Pelajaran PPKn	12
a. Pengertian PPKn	12

b. Landasan Pendidikan PPKn	14
c. Tujuan Pendidikan PPKn	16
4. Perangkat Pembelajaran	17
a. Silabus	18
b. RPP.....	19
c. LKS	20
d. Instrumen penilaian.....	20
B. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	25
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
C. Instrumen Penelitian	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Gambaran Sekolah Secara Umum	31
a. Profil Sekolah	31
b. Visi Misi Sekolah.....	32
c. Struktur Organisasi Sekolah	34
d. Sarana & Prasarana Sekolah	35
e. Kurikulum SMA Negeri 16 Medan	35
2. Deskripsi Hasil Penelitian	41
a. Deskripsi KD dan materi terintegrasi dengan <i>civic disposition</i>	41

b. Deskripsi Proses pembelajaran	41
c. Deskripsi Perencanaan Pembelajaran	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V KESIMPULAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Sekolah	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Program Semester
- Lampiran 2 Silabus
- Lampiran 3 RPP
- Lampiran 4 Pemetaan Kompetensi Dasar
- Lampiran 5 Lembar Observasi Kelompok Belajar Siswa
- Lampiran 6 Dokumentasi Sekolah
- Lampiran 7 Surat K1
- Lampiran 8 Surat K2
- Lampiran 9 Surat K3
- Lampiran 10 Berita Acara Bimbingan Proposal
- Lampiran 11 Lembar Pengesahan Proposal
- Lampiran 12 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 13 Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
- Lampiran 14 Berita Acara Skripsi
- Lampiran 15 Lembar Pengesahan Skripsi
- Lampiran 16 Surat Izin Riset
- Lampiran 17 Surat Balasan Riset
- Lampiran 18 Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 19 Data Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang di maksud isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional

Upaya pemerintah memperbaharui kurikulum yang sebelumnya adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K13) adalah salah satu langkah dalam mengatasi persoalan di dunia pendidikan seperti persoalan kenakalan remaja, melemahnya karakter siswa dan sebagainya. Dewasa ini melemahnya karakter warga negara yang baik pada diri siswa memunculkan sikap egois dan fundamental, tampaknya sampai saat ini kita

sedang berada dalam krisis multidimensi, yakni krisis nilai moral yang berujung pada aksi kriminal dilingkungan sekolah, di era kecanggihan teknologi masa kini banyak sekali pemberitaan mengenai perubahan nilai-nilai positif dalam lingkungan pendidikan yang menjadi viral seperti salah satu contoh dikutip dari berita online iNews.id 8 april 2019 dengan judul “Viral, Video Guru dan Murid SMA Baku Hantam dalam Kelas di Bojonegoro” video kekerasan di lingkungan pendidikan tersebut tersebar diberbagai media sosial berdurasi 20 detik, peristiwa tersebut bermula saat sang murid duduk dikursi guru yang berada didalam kelas, guru kemudian menegur di hadapan teman-teman sekelasnya, tidak terima dengan teguran tersebut siswa bersikap tidak sopan terhadap guru lalu keduanya tersulut emosi dan aksi kekerasan pun tak terhindarkan.

Menurut Budimansyah (2010: 129) secara konseptual pendidikan nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, pendidikan nilai secara substansif melekat dalam semua dimensi tujuan yang terdapat dalam UU 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas (Pasal 3) yang memuatkan perhatian pada nilai akidah keagamaan, nilai sosial keberagaman, nilai kesehatan jasmani dan ruhani, nilai keilmuan, nilai kreativitas, nilai kemandirian, dan nilai demokratis yang bertanggung jawab.

Winaputra (dalam Budimansyah 2010: 132) mengatakan, di Indonesia pendidikan nilai secara kurikuler terintegrasi antara lain dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa dan seni.

Di Indonesia, sekolah telah diberikan tanggung jawab dalam upaya pembangunan karakter sejak awal kemerdekaan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Sejak masuk dalam kurikulum sekolah

mulai tahun 1962 sampai saat ini, PKn mengalami berbagai perubahan baik nama, orientasi, substansi, maupun pendekatan pembelajarannya.

Nuryadi dan Tolib (2016: i) mengatakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kompetensi dasar atau yang disebut kompetensi minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan pada terdiri dari tiga jenis: pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowlage*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) demokrasi, hak asasi manusia dan Masyarakat Madani; kedua kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen kesetaraan gender, toleransi, kemajemukandan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Perubahan nilai-nilai positif di lingkungan pendidikan berhubungan dengan sikap atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositon*) peserta didik, *civic disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PPKn. Kompetensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua kompetensi lainnya yaitu *civic skill* dan *civic knowledge*. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya menggiatkan atau menghidupkan kembali karakter kewarganegaraan peserta didik melalui mata pelajaran PPKn demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang akan penulis lakukan berjudul “ **Revitalisasi Civic Disposition melalui Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan TP 2019/2020** “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nilai-nilai positif dalam lingkungan pendidikan
- b. Belum tercapainya tujuan pendidikan nasional
- c. Melemahnya karakter kewarganegaraan yang baik pada diri peserta didik
- d. Kurangnya pemahaman mengenai karakter kewarganegaraan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas sebagaimana telah diuraikan agar tujuan penelitian menjadi jelas, perlu dilakukan penegasan dan pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu revitalisasi civic disposition melalui mata pelajaran PPKn pada siswa kelas XI di SMAN 16 Medan TP 2019/2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana revitalisasi karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui bagaimana revitalisasi karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Program studi PPKn

Sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi mahasiswa juga peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama di lokasi yang berbeda

2. Bagi sekolah

Diharapkan sekolah SMA Negeri 16 Medan lebih maju dan berkembang dalam membina, mendidik dan merevitalisasi para siswa untuk memiliki karakter kewarganegaraan sehingga menjadi warga Negara yang baik

3. Bagi masyarakat

Diharapkan orang tua siswa menjadi salah satu media revitalisasi karakter kewarganegaraan di rumah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam meningkatkan wawasan dalam bidang penelitian

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Revitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa revitalisasi merupakan proses untuk menggiatkan kembali atau pembangunan kembali nilai-nilai yang telah mengalami penurunan sehingga nilai-nilai tersebut dapat hidup kembali dan bukan hanya menggiatkan kembali, sebagai tindak lanjut menggiatkan kembali revitalisasi juga mempunyai makna menghidupkan, meningkatkan, merangsang, mendorong, memperkuat, mendukung, dan membangun kembali .

2. Pengertian *Civic Disposition*

Branson (dalam Mulyono,2017: 222) mengatakan *Civic disposition* merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic competences*) yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*),

dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warganegara yang baik.

Civic knowledge berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek dari *civic knowledge* ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Sedangkan *civics skill* atau kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan- kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).

Sedangkan *civic disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Kompetensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua kompetensi sebelumnya.

Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi- organisasi *civil society*. Pengalaman- pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri

yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab, moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

a. Karakter privat dan karakter publik

Menurut Budimansyah (2010: 30) Konsep lain yang kerap kita temukan dalam studi kewarganegaraan adalah karakter privat dan karakter publik. Konsep ini diperkenalkan oleh Margaret Bronson (1998) pada saat menguraikan komponen dasar ketiga dari kompetensi kewarganegaraan yakni watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter privat maupun publik yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangann demokrasi konstusional. Karekter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of game*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Secara singkat karakter privat dan publik itu dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.

Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggungjawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar menerima tanggung jawab akan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan egal sebagai anggota masyarakat demokratis.

2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan dibidang ekonomi dan politik.

Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri,memberi nafkah, dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, menggunakan hak pilih dalam pemilu, membayar pajak, menjadi saksi pengadilan, kegiatan ini pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Menghormati pendapat orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, dan mengikuti aturan musyawarah mufakat dan prinsip mayoritas namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

Karakter ini merupakan bentuk sadar informasi sebelum menentukan pilihan atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Juga membuat evaluasi tentang kapan saat nya kepentingan pribadi seseorang sebagai warganegara harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan mengevaluasi seseorang karena

kewajibannya karena prinsip-prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu.

5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi serta mengambil langkah yang diperlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara yang damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana

Bertanggung jawab moral

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial, yang mendasari tindakan atau pemikiran.

Disiplin diri

Disiplin diri adalah suatu kemampuan untuk membuat diri melaksanakan apa yang semestinya harus dilaksanakan tidak peduli hal tersebut adalah hal yang disukai atau tidak disukai

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

Penghargaan terhadap derajat kemuliaan manusia dan harga diri atau tingkat harkat manusia.

Kepedulian sebagai warga negara

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Kepedulian sebagai warga negara adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di negara kita

Kesopanan

kesopanan adalah serangkaian aturan tentang tingkah laku yang bersumber dari budaya, adat istiadat, atau tradisi di suatu wilayah yang berkembang dalam pergaulan anggota masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan dalam berinteraksi antar sesama

Mengindahkan aturan main

Mengindahkan aturan main adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak.

Berpikir kritis

Berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Dalam penalaran dibutuhkan kemampuan berpikir kritis atau dengan kata lain kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari penalaran.

Mendengarkan , bernegosiasi dan berkompromi

Mendengarkan adalah merespon atau menerima bunyi secara disengaja.

Memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh orang lain.

bernegosiasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam upaya mencapai kesepakatan melalui diskusi formal.

Berkompromi adalah sebuah cara yang indah untuk memecahkan masalah dan masalah secara damai melalui percakapan langsung

b. Karakter cerdas

Karakter cerdas digagas dan dipopulerkan oleh Prayitno (dalam Budimansyah, 2010: 33). Gagasan ini diawali oleh suatu pandangan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan dalam taraf tertentu yang tercermin dari prilakunya yang aktif, objektif, analitis, aspiratif, kreatif, dan inovatif, dinamis dan antisipatif, berpikir terbuka dan maju, serta mencari solusi. Kecerdasan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan memanipulasi unsur-unsur kondisi yang dihadapi untuk sukses mencapai tujuan.

3. Mata pelajaran PPKn

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan pada mulanya berkembang di Amerika Serikat sekitar tahun 1790. Pendidikan kewarganegaraan atau *civic* memiliki tujuan untuk lebih mengenal bangsa sendiri, dan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Rendall Waite di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, istilah *civic* atau *civic education* mulai dikenal luas pada tahun 1957. Dan pada tahun 1962, lantas diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia yang kemudian dikenal dengan kewarganegaraan, lalu pada tahun 1968 menjadi pendidikan kewarganegaraan.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan masuk di dalam kurikulum pendidikan sekolah sekitar tahun 1968. Seiring waktu mengalami perubahan mengenai nama sebutannya, namun isi pokok didalamnya tetaplah sama, yakni sekitar tahun 1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau sering disingkat PMP. Kemudian pada tahun 1994, sebutan tersebut berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dan berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2000 an hingga saat ini.

Secara harafiah, pendidikan kewarganegaran merupakan terjemahan dari bahasa inggris yakni "*Civic Education*". Yang kemudian di alih bahasakan oleh para ahli dalam bahasa Indonesia sebagai Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Azra dan Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, mengungkapkan sebuah istilah "Pendidikan Kewargaan" menjadi pengembang Civic Education pertama di perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbud) No. 22 Tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Demi menjadi seorang warga negara yang berkarakter, memiliki

kecerdasan, keterampilan, sebagai mana berdasar pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan adalah nama dari salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran pengembangan kepribadian bagi setiap anak didik, yang bertujuan membantu siswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan seni dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan kemanusiaan.

Nuryadi dan Tolib (2016: 1) mengatakan PPKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penghayatan terhadap filosofi Bhineka Tunggl Ika

Pendidikan kewarganegaraan berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat pancasila. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan dilembaga-lembaga formal yakni dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

b. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan pendidikan kewarganegaraan secara ilmiah merupakan dasar pemikiran mengenai tentang bagaimana seorang warga negara yang

memiliki kehidupan yang berada ditengah kemajemukan masyarakat, terdapat tuntutan demi sebuah kehidupan yang memiliki manfaat serta bermakan bagi masyarakat bangsa dan juga negara secara menyeluruh. (baca juga: Manfaat UUD Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara)

Didalam landasan ilmiah ada beberapa hal yang termasuk didalamnya, berikut ini:

1. Dasar Pemikiran, sebagai dasar dalam berpikir mengenai sebuah ilmu pengetahuan.
2. Objek Pembahasan, dalam sebuah ilmu wajib memiliki syarat-syarat secara ilmiah yakni objek, metode, sistem dan bersifat menyeluruh.
3. Rumpun Keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan mampu disandingkan dengan *civics education* yang telah mulai dikenal dipenjuru dunia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki sifat yang umum di semua bidang pendidikan (interdisipliner) dan bukan monodisipliner. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan kewarganegaraan merupakan gabungan beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi.

Secara hukum pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa landasan utama, sebagaimana berikut ini:

Dalam UUD 1945, disebutkan dalam alinea kedua dan keempat. Serta Pasal 27 ayat 1, Pasal 30 ayat 1 juga Pasal 31 ayat 1.

Dalam UU No. 20 tahun 1982 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI (jo. UU No. 1 tahun 1988).

Dalam UU No 2 tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/kep./2000 mengenai penyempurnaan kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) PKN pada seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki sebuah pengertian sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh seseorang secara terencana guna mencerdaskan kehidupan seseorang tersebut dan juga orang lain. Sesungguhnya hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah tata aturan dan pelaksanaan pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai pendidikan karakter bangsa Indonesia yang secara nyata tertuang didalam UUD 1945. Dan dalam pengembangannya merupakan cara melestarikan budaya bangsa yang bernilai luhur.

c. Tujuan pembelajaran PPKn

Nuryadi dan Tolib, (2016: i) mengatakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu, tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA/SMK/MA/MAK

adalah upaya mengembangkan kualitas warganegara secara dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pengembangan peserta didik agar mampu :

1. Berpikir secara rasional, kritis, kreatif, dan etis serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang independen, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
3. Berkomitmen dan proaktif dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai karakter bangsa Indonesia.
4. Berkembang secara positif dan demokratis dalam mengembangkan konstitusi yang dinamis serta memiliki kemauan, keyakinan, kesetiaan, dan kebanggaan serta keteguhan sebagai bangsa Indonesia

4. Perangkat pembelajaran

Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI (2007: 17), perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Menurut. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan

peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas.

Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran.

a.Silabus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus untuk mata pelajaran SMA secara umum berisi:

1. Identitas mata pelajaran
2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas

3. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk semua jenjang pendidikan, kelas dan mata pelajaran.
4. Kompetensi dasar, berkaitan dengan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.
5. Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
6. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
7. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
8. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun, dan
9. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

b. RPP

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, bahwa tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selanjutnya dijelaskan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara

rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup beberapa hal yaitu:

- (1) Data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/ semester;
- (2) Materi Pokok;
- (3) Alokasi waktu;
- (4) Tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi;
- (5) Materi pembelajaran; metode pembelajaran;
- (6) Media, alat dan sumber belajar;
- (7) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran;
- (8) Penilaian.

Serta terdapat metode mengajar menurut Siregar (2016: 421) metode mengajar adalah suatu jalan atau cara seorang guru dalam membimbing peserta didiknya dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai, selain ditentukan atau dipengaruhi oleh tujuan juga oleh faktor kesesuaian dengan bahan, kemampuan guru menggunakannya, keadaan peserta didik, dan situasi yang ada

c.Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Depdiknas (2007), LKS adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Tugas yang diperintahkan dalam LKS harus mengacu pada kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. Tugas tersebut dapat berupa tugas teoritis dan tugas. LKS digunakan sebagai sarana untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar-mengajar.

d. Instrumen Penilaian

Penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Dalam Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran dijelaskan bahwa penilaian dalam setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar dari masing-masing domain tersebut.

Ada beberapa teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik baik berupa tes maupun non-tes antara lain tes tertulis, penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian hasil karya, penilaian portofolio dan penilaian diri

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka pemikiran yang menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teori.

Revitalisasi merupakan proses untuk menggiatkan kembali atau pembangunan kembali nilai-nilai yang telah mengalami penurunan sehingga nilai-nilai tersebut dapat hidup kembali dan bukan hanya menggiatkan kembali, sebagai tindak lanjut menggiatkan kembali revitalisasi juga mempunyai makna menghidupkan, meningkatkan, merangsang, mendorong, memperkuat, mendukung, dan membangun kembali

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter privat maupun publik yang penting bagi pemeliharaan dan

pengembangann demokrasi konstusional. Karekter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of game*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian harus dilaksanakan berdasarkan suatu metode untuk mencapai semua penelitian yang diinginkan, sebab pengguna metode yang sesuai akan memberikan hasil yang diharapkan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

Sugiyono (2009: 15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode ini digunakan karena menggambarkan ataupun melukiskan keadaan suatu objek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, berdasarkan penulisan lapangan.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian 23

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan penelitian, lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan lokasi penelitian.

Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yaitu lokasi ini dipilih oleh penulis karena belum pernah dilakukan penelitian sesuai judul yang diteliti penulis, penulis merasa tertarik untuk meneliti di SMA Negeri 16 Medan, Jl. Kapten Rahmad Buddin Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan, kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan dan lamanya waktu penelitian dinyatakan secara jelas, adapun waktu penelitian ini dilaksanakan adalah awal bulan April 2019. Dan tabel rencana dan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan pelaksanaan penelitian

N O	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■																							
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																				
4	Pengesahan Proposal									■	■																		
5	Seminar Proposal												■	■															
6	Pengesahan Proposal													■	■														
7	Surat Izin Riset																				■								
8	Pengolahan Data																					■	■	■	■				
9	Bimbingan Skripsi																									■	■		
10	Pengesahan Skripsi																										■	■	
11	Sidang Meja Hijau																												■

c. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Salim dan Syahrin (dalam Fauzi 2018: 21) subyek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman teman bahkan

konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subyek peneliti adalah:

1. Peneliti sendiri
2. Kepala sekolah selaku penanggung jawab atas terlaksananya pendidikan di SMA Negeri 16 Medan
3. Guru PPKn di SMA Negeri 16 Medan

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan, yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Sesuai pernyataan diatas, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI (sebelas) SMA Negeri 16 Medan karena materi PPKn pada kelas XI lebih sesuai dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian sampel diambil secara sengaja sesuai persyaratan sampel yang diperlukan . dalam hal ini, pertimbangan peneliti mengambil guru PPKn sebagai salah satu sampel adalah karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu melakukan revitalisasi *civic disposition* kemudian peneliti juga mengambil sampel seluruh siswa kelas XI (sebelas) yang dijadikan informan

d. Instrumen Penelitian

1. Observasi

Menurut Sutrisno (dalam, Sugiyono 2009: 203) Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

Sugiyono (2009: 310) menyebutkan macam-macam observasi yaitu

a. Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.

b. Observasi Tak Berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Menurut Sugiyono (2009: 320) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Kepala Sekolah, Guru PPKn dan siswa di SMA Negeri 16 Medan.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi sangat penting dalam analisis sebab dalam analisis isi sumber-sumber dalam bentuk tertulis tetap menjadi bahan paling utama dalam studi dokumentasi, apabila ada kekeliruan tentang sumber datanya yang masih dapat dicek ulang, sebab dokumen adalah bersifat benda mati dan tidak akan berubah.

Pada penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan maupun foto-foto pada saat proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan. Melalui studi dokumentasi maka akan diketahui bagaimana guru dalam merevitalisasi *civic disposition* terhadap siswa

4. Triangulasi

(Sugiyono, 2009: 330) dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan

dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi yang telah ada. bila peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data

e. Teknik Analisis Data

(Sugiyono, 2009: 335) yang dimaksud teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan penumpukan data.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya menampilkan data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya.

3. Verifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Sekolah Secara Umum

Nama Sekolah : SMA Negeri 16 Medan

NPSN : 10210863

Alamat Sekolah

Jalan : Jln. Kapten Rahmad Buddin

Kelurahan : Rengas Pulau

Kecamatan : Medan Marelan

Kabupaten : Medan Marelan

Propinsi : Sumatera Utara

Kode Pos : 20256

Telp : (061) 6850663

Email : Info@sman16medan.sch.id

Waktu penyelenggaraan : Pagi

Tahun berdiri : 1984

SMA Negeri 16 Medan berdiri pada tahun 1984 dan dikepalai pertama kali oleh Ibu Dra. Hj Khairiah, pada awalnya SMA Negeri 16 Medan adalah SMA Negeri 14 Medan tahun 1984 kemudian berubah nama pada tahun 1987 menjadi SMA Negeri 15 Medan dan tahun 1997 berubah nama menjadi SMA Negeri 16 Medan sampai dengan sekarang. Pada awal berdirinya, lokasi SMA Negeri 16 Medan berada di jalan Kapten Rahmad Buddin Kel. Terjun Kec. Medan Marelan.

Sampai sekarang ini SMA Negeri 16 Medan masih tetap exis berada di Jalan Kapten Rahmad Buddin Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan kota Medan. Perjalanan panjang yang telah diakui SMA Negeri 16 Medan dari awal berdirinya hingga sekarang membuat SMA Negeri 16 Medan benar-benar mampu menjadi sekolah yang matang, sesuai dengan usia dan pengalaman yang telah dilaluinya sehingga mampu melahirkan siswa-siswa yang kelak dikemudian hari menjadi orang-orang yang penting, sukses dan berguna ditengah-tengah masyarakat, negara dan agama. Semua kesuksesan tersebut tidak lepas dari hasil jerih payah segenap guru-guru SMA Negeri 16 Medan yang ikhlas memberikan ilmunya dan mendidik siswa-siswanya sampai sekarang.

a. Visi dan Misi Sekolah

Visi SMA Negeri 16 Medan:

- ✓ Mewujudkan Insan Indonesia yang berkarakter dan berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, cerdas, kreatif, inovatif dan menguasai IPTEK serta mampu bersaing dalam kompetisi global.

Misi SMA Negeri 16 Medan:

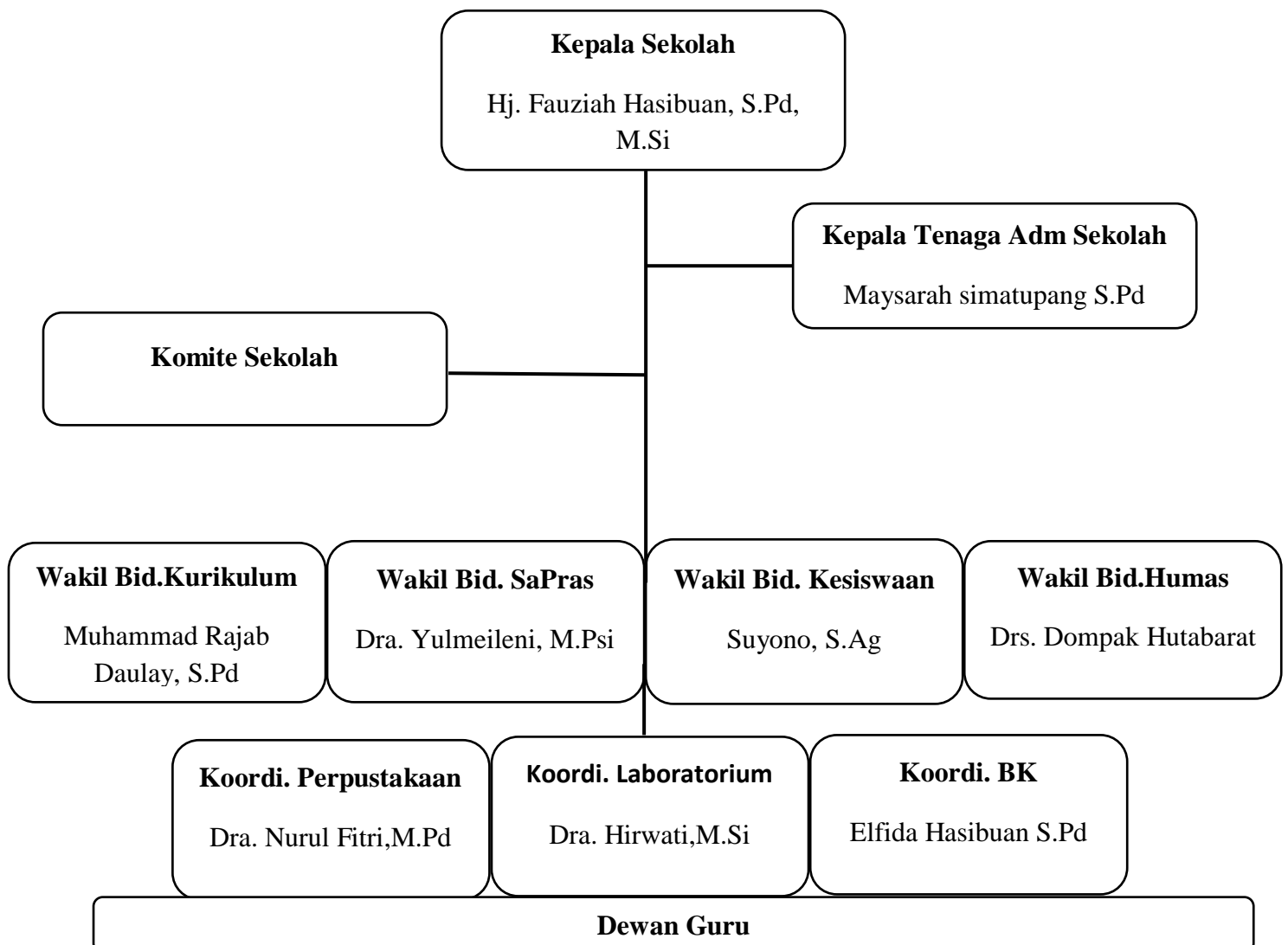
- ✓ Mengedepankan Pendidikan karakter yang berdasarkan ideologi Pancasila dan meningkatkan jiwa Nasionalisme yang kuat dan bermartabat.
- ✓ Meningkatkan Mutu Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya lingkungan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- ✓ Menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program Literasi dengan didukung Perpustakaan yang berkualitas untuk mewujudkan siswa yang Cerdas, Kreatif, Inovatif dan mampu bersaing dalam kompetisi Global.
- ✓ Menanamkan kedisiplinan melalui budaya Bersih, budaya Tertib dan budaya Kerja.
- ✓ Mengoptimalkan seluruh komponen Sekolah baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana dan mensinergikan guna mewujudkan Visi Sekolah.
- ✓ Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Kondusif, kekeluargaan dan penuh Tanggung Jawab.

- ✓ Menciptakan Sekolah Adiwiyata
- ✓ Menjalin hubungan yang harmonis antara Sekolah dengan Wali Murid, Masyarakat, Instansi dan Lembaga dalam rangka pencapaian Visi Sekolah yang optimal.

b. Struktur Organisasi Sekolah

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Sekolah



c. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, penulis melihat bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyukseskan tujuan pendidikan di SMA Negeri 16 Medan dapat dikategorikan sangat memadai, tercukupi sarana dan prasarana tersebut di dukung oleh tingginya kepedulian pihak pengelola dalam memenuhi dan melengkapi sarana yang dibutuhkan.

d. Kurikulum SMA Negeri 16 Medan

1. Penyusunan jadwal kegiatan pembelajaran dilakukan pada awal Tahun Pelajaran, yang meliputi : penyusunan roster pelajaran, pembagian jam mengajar guru, dan pembagian tugas guru di luar jam mengajar.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
 - a. Penyusunan Program Tahunan,
 - b. Penyusunan Program Semester,
 - c. Penyusunan Silabus,
 - d. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
 - e. Penetapan KKM / SKBM,
 - f. Penyusunan Kegiatan Evaluasi,
 - g. Perencanaan Kegiatan Remedial,
 - h. Pelaporan hasil kegiatan belajar peserta didik.
3. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman

muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyusunan Struktur kurikulum didasarkan atas standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh BSNP. Sekolah atas persetujuan Komite Sekolah dan memperhatikan keterbatasan sarana belajar serta minat peserta didik, SMA Negeri 16 Medan menetapkan pengelolaan kelas pembelajaran sebagai berikut ini :

a. SMA Negeri 16 Medan untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 memberlakukan Kurikulum 2013 untuk Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII.

b. SMA Negeri 16 Medan menerapkan sistem paket. Peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam struktur kurikulum.

c. Jumlah rombongan belajar Kelas X berjumlah 8 (delapan) rombongan belajar, Kelas XI berjumlah 10 (sepuluh) rombongan belajar, dan Kelas XII berjumlah 8 (delapan) rombongan belajar.

d. Kelas X , XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas :

– Program Ilmu Pengetahuan Alam, 16 rombongan belajar (Kelas X, 6 rombongan belajar dan Kelas XI, 6 rombongan belajar dan kelas XII 4 Rombongan belajar).

– Program Ilmu Ilmu Sosial, 9 rombongan belajar (Kelas X, 2 rombongan belajar Kelas XI, 4 rombongan belajar dan Kelas XII, 3 rombongan belajar).

1). Kurikulum Kelas X, XI, dan XII, terdiri atas :

16 mata pelajaran, yaitu :

1. Pendidikan Agama,
2. Pendidikan Kewarganegaraan,
3. Bahasa Indonesia,
4. Bahasa Inggris,
5. Matematika wajib / Matematika Minat
6. Sejarah Indonesia / Sejarah Minat
7. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,
8. Seni Budaya
9. Fisika,
10. Biologi,
11. Kimia,
12. Ekonomi
13. Sosiologi
14. Geografi
15. Sastra Inggris
16. Bahasa Jerman

2). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.

3). Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri diarahkan untuk pengembangan karakter peserta didik yang dituju-kan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan masyarakat di lingkungan sekitarnya, dan persoalan kebangsaan.

Program kegiatan pengembangan diri dalam Kurikulum SMA Negeri 16 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020, meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Sedangkan kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang diikuti oleh semua peserta didik.

Pengembangan diri yang dilaksanakan melalui kegiatan terprogram, terdiri atas :

1) Pengembangan diri melalui pelayanan konseling, meliputi aspek :

- a) Kehidupan Pribadi
- b) Kemampuan Sosial
- c) Kemampuan Belajar
- d) Wawasan dan Perencanaan Karir.

2) Pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler, meliputi kegiatan :

- a) Krida
- b) Karya Ilmiah
- c) Latihan/Lomba Keberbakatan/Prsetasi/Keterampilan

d) Seminar, Lokakarya, Pameran/Bazar, dan Kegiatan Lapangan.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri dalam Kurikulum SMA Negeri 16 Medan, meliputi sebagai berikut :

1). Pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok dan atau klasikal melalui penyelenggaraan :

a) Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling

b) Kegiatan Ekstra Kurikuler

2). Pengembangan diri secara tidak terprogram dilaksanakan sebagai berikut :

a) Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terjadwal, seperti : upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan individual dan bersama, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri.

b) Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian-kejadian khusus, seperti: pembentukan perilaku kebiasaan memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, dan mengatasi silang pendapat (pertengkaran).

c) Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti : berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.

d) Pengkondisian, adalah pengadaan sarana yang mendorong terbentuknya peri-laku terpuji.

Sekolah memfasilitasi kegiatan pengembangan diri.

Pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas (intra-kurikuler) dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka, yaitu :

a) Bimbingan Konseling, mencakup hal-hal yang berkenaan dengan pribadi, ke-masyarakatan, belajar, dan karier peserta didik.

Bimbingan Konseling diasuh oleh guru yang ditugaskan.

b) Pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di luar kelas (ekstra-kurikuler) diasuh oleh guru pembina. Pelaksanaannya secara reguler setiap hari Sabtu.

4. Beban Belajar

Sekolah menetapkan beban belajar peserta didik sebagai berikut :

a. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.

b. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 30 % dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

c. Alokasi waktu untuk praktik adalah satu jam tatap muka setara dengan dua jam kegiatan praktik di sekolah atau empat jam praktik di luar sekolah.

5. Ketuntasan Belajar Minimal (KBM)

Ketuntasan belajar setiap indikator yang dikembangkan sebagai suatu pencapaian hasil belajar dari suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 – 100 %. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75 %. Sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai target ketuntasan belajar peserta didik dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta

kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sekolah secara bertahap dan berkelanjutan selalu meng-upayakan peningkatan kriteria ketuntasan minimal untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Deskripsi kompetensi dasar dan materi PPKn terintegrasi dengan *civic disposition*

Berdasarkan hasil observasi dan didukung dengan dokumentasi pemetaan kompetensi dasar, program semester, silabus, dan RPP kompetensi dasar dan materi mata pelajaran PPKn terintegrasi dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Diantaranya materi konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam pancasila, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, upaya penegakan hak asasi manusia, hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, membangun kehidupan yang demokratis di inonesia. Diperkuat dengan adanya tujuan pembelajaran yang peneliti ambil di kelas XI berdasarkan waktu penelitian dan batasan masalah yaitu siswa mengidentifikasi dan menganalisis berbagai contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, mengidentifikasi berbagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, membuat laporan analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia, mengetahui hakikat demokrasi dan penerapannya di Indonesia, mengetahui perilaku yang mendukung tegaknya

nilai-nilai demokrasi, memaparkan hasil analisis tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.

b. Deskripsi proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan

Proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Medan tidak lepas dari proses perencanaan dan persiapan yang dilakukan guru sebelum mengajar. Guru mata pelajaran PPKn selalu berusaha mempersiapkan diri dengan baik sebelum menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada para siswa. Berdasarkan hasil observasi memang terlihat jelas bahwa guru mata pelajaran PPKn benar-benar siap dalam mengajarkan materi. Hal ini bisa dibuktikan dengan tersedianya perangkat pembelajaran berupa Sillabus, RPP, format penilaian dan portofolio nilai siswa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para siswa yang mengatakan bahwa: “Pada saat mengajar guru mata pelajaran PPKn selalu menyediakan sillabus dan RPP. Guru kami selalu menjelaskan terlebih dahulu pokok-pokok materi yang akan diajarkan, menyangkut standar kompetensi dan kompetensi dasar, bahkan tujuan yang hendak dicapai lewat materi yang diajarkan.” Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang mengatakan bahwa: “Di sekolah kami ini, masing-masing guru mata pelajaran diwajibkan membuat perangkat pembelajaran di awal semester sebelum tahun ajaran dimulai. Guru yang tidak membuat perangkat pembelajaran tentunya kami berikan sanksi berupa teguran atau arahan lainnya .”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran, kami menemukan bahwa guru pendidikan Pendidikan

Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) memang menyediakan media pembelajaran. Di dalam kelas selalu tersedia infokus, laptop, peta, globe, gambar-gambar, dll. Selain itu dalam proses pembelajaran guru mata pelajaran PPKn juga memanfaatkan media di luar kelas seperti masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas, bangunan-bangunan pemerintahan, rumah ibadah, situs-situs budaya, dan lain-lain. Diperkuat dengan wawancara peneliti pada siswa “ kami pernah ditugaskan kerja kelompok dengan mengamati kegiatan-kegiatan disekitar lingkungan kami”

c. Deskripsi perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PPKn untuk merevitalisasi *civic disposition* siswa.

Secara konseptual pendidikan nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan sebagaimana tersurat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 3) adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.” Pendidikan nilai secara substansial melekat dalam semua dimensi tujuan tersebut yang memusatkan perhatian pada nilai aqidah keagamaan, nilai sosial keberagaman, nilai kesehatan jasmani dan rohani, nilai keilmuan, nilai kreativitas, nilai kemandirian, dan nilai demokratis yang bertanggungjawab.

Selanjutnya berdasarkan observasi, guru mata pelajaran PPKn menggunakan Model pembelajaran Jigsaw yaitu suatu model pembelajaran

yang mengutamakan keaktifan siswa (*student centered*) dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Para anggota dari kelompok asal yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk berdiskusi (antar ahli), saling membantu satu dengan yang lainnya untuk mempelajari topik yang diberikan (ditugaskan pada mereka). Siswa tersebut kemudian kembali pada kelompok masing-masing (kelompok asal) untuk menjelaskan kepada teman-teman satu kelompok tentang apa yang telah dipelajarinya. Guru mengawasi pekerjaan masing-masing kelompok. Dan jika diperlukan membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan memberikan penekanan terhadap topik yang sedang dibahas. Pada akhir pembelajaran diberikan kuis dengan materi yang telah dibahas. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran dalam model ini dapat dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

Awal kegiatan pembelajaran

Persiapan

1. Melakukan pembelajaran pendahuluan, dimana Guru dapat menjabarkan isi topik secara umum, memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan dipelajarinya topik tersebut.
2. Materi pembelajaran kooperatif model jigsaw dibagi menjadi beberapa bagian pembelajaran tergantung pada banyak anggota dalam setiap kelompok serta banyaknya konsep materi pembelajaran yang ingin dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa.

3. Membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli, Kelompok dalam pembelajaran kooperatif model jigsaw beranggotakan 3-5 orang yang heterogen baik dari kemampuan akademis, jenis kelamin, maupun latar belakang sosialnya
4. Menentukan Skor Awal, Skor awal merupakan skor rata-rata siswa secara individu pada kuis sebelumnya atau nilai akhir siswa secara individual pada semester sebelumnya.

Rencana Kegiatan

1. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan sub topik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli
2. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua sub topik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok.
3. Siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan topik yang didiskusikannya
4. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik.
5. Pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok.

Sistem Evaluasi

Dalam evaluasi ada tiga cara yang dapat dilakukan:

(1)Mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. (2)Membuat laporan mandiri atau kelompok. (3)Presentasi.

c. Pembahasan Hasil Penelitian

Revitalisasi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat terlaksana melalui mata pelajaran PPKn dimana kompetensi dan materi dalam mata pelajaran PPKn terintegrasi dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Watak kewarganegaraan (*Civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional dalam tujuan pembelajaran berdasarkan observasi, siswa diharapkan mengetahui perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, memaparkan hasil analisis tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.

Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi/*civil society*. Di sekolah khususnya dalam mata pelajaran PPKn guru berupaya dengan maksimal dibuktikan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik atau hampir sempurna dan memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia disekolah agar watak kewarganegaraan terus terevitalisasi sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari.

Civic Dispositions pada dasarnya berkaitan erat dengan karakter siswa dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru PPKn di SMA Negeri 16 Medan dalam merevitalisasi *Civic Dispositions* siswa salah satunya dengan penggunaan Model pembelajaran Jigsaw yaitu suatu model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa (*student centered*).

Melalui model pembelajaran Jigsaw yang mengutamakan keaktifan siswa (*student centered*) tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai selain itu karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu terevitalisasi pada saat siswa berdiskusi mengenai sebuah materi dengan kelompoknya, setiap siswa bertanggung jawab dengan pendapatnya dalam kelompok, disiplin terhadap aturan kelompok yang telah disepakati, dan menghargai pendapat dari rekan nya didalam kelompok

Kemudian Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi terrevitalisasi

melalui mata pelajaran PPKn dengan model pembelajaran Jigsaw yang mengutamakan keaktifan siswa (*student centered*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Revitalisasi *civic disposition* dapat terlaksana melalui mata pelajaran PPKn dimana kompetensi dan materi dalam mata pelajaran PPKn terintegrasi dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*)
2. Di sekolah khususnya dalam mata pelajaran PPKn guru berupaya dengan maksimal melaksanakan revitalisasi dibuktikan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik dan memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia disekolah agar watak kewarganegaraan terus terrevitalisasi sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari.
3. Melalui model pembelajaran Jigsaw yang mengutamakan keaktifan siswa (*student centered*) tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai selain itu karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu terrevitalisasi pada saat siswa berdiskusi mengenai sebuah materi dengan kelompoknya. Kemudian Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi juga terrevitalisasi

B. SARAN

1. Kepada kepala sekolah SMA Negeri 16 Medan agar memperhatikan dan memaksimalkan program-program yang dapat mendukung revitalisasi *civic disposition* siswa
2. Kepada guru PPKn di SMA Negeri 16 Medan agar lebih meningkatkan minat siswa untuk belajar PPKn dan melakukan kegiatan di dalam ataupun luar kelas untuk merevitalisasi *civic disposition*, perlu upaya yang keras untuk merevitalisasi *civic disposition* siswa
3. Kepada peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai *civic disposition* yang tidak hanya melalui mata pelajaran PPKn semisal melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan di luar sekolah

Daftar Pustaka

Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung. Widya Aksara Press.

Budimansyah, Dasim. 2012. *Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter*. Bandung. Widya Aksara Press.

Dasim, Suryadi. 2008. *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung. Widya Aksara Press.

Fauzi. 2018. Revitalisasi Nilai Relegius melalui Pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 4 Medan. [Skripsi]. Medan (ID). UMSU

Kansil. 2003. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*. Jakarta. PT Pradnya Paramita

Mulyono, Budi. 2017. *Reorientasi Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Warga Negara Yang Ideal*. [Jurnal] Jurnal Civic volume 14 Nomor 2. 218-225

Nuryadi, Tolib. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Balitbang Kemendikbud

Permendikbud No 65 Tahun 2013 Ttg Standar Proses Pendidikan Dasar & Menengah

Permendikbud No 81 Tahun 2013 Ttg Implementasi Kurikulum & Pedoman Umum

PermenPU No 18 Tahun 2010 Tentang Revitalisasi Kawasan

Pusat Bahasa Depdiknas, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

Sanjaya, Wina. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pusat*. Jakarta. Prenada Media Group

Siregar, Hotma 2016. *Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM)* [Jurnal] The Progressive and Fun Education Seminar 421-428

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/7834/50.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/7834/50.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung. CV ALFABET

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Aslam
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Supratman Radi Koto
Nama Ibu : Siti Sahara
Alamat Rumah : Jl. Paltina Raya Lk 21 R.Pulau M.Marelan

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2002-2008 : SDI Ar-Ridha Medan
- Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 20 Medan
- Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 16 Medan
- Tahun 2015-sampai sekarang : Universitas Muhamamdiyah
Sumatera Utara